

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kemajuan pada teknologi dan ruang lingkup dunia yang tidak bisa dihindari, Beberapa negara sudah merasakan dampak globalisasi yang terjadi akibat kemajuan teknologi yang begitu pesat dan ketidakmampuan untuk menghentikannya. Globalisasi akan terjadi, dan negara Asia yang paling terkena dampak adalah Indonesia. Perkembangan ini terus mengakibatkan perubahan atau transformasi yang bersamaan dengan sistem teknologi dan informasi ke dalam dunia internasional yang berdampak baik untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Ini adalah contoh negara yang menggunakan teknologi untuk memajukan e-government, atau pemerintahan digital, di banyak wilayah di dunia. (Puspitasari *et al.*, 2021). Penerapan teknologi ini juga berupaya mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara Tiko Septiarika & Suryanjari (2020). Selain itu, Indonesia menegaskan bahwa bangsanya sendiri terkena dampak globalisasi. Indonesia sangat bergantung pada teknologi untuk berkembang menjadi negara berkembang yang mampu bersaing dengan negara lain. (Ramadhan *et al.*, 2020).

Gagasan pemerintahan berbasis informasi dengan menggunakan teknologi informasi sudah lama diupayakan di Indonesia. Pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendorong penerapan teknologi informasi pada prosedur administrasi dan pelayanan masyarakat. Kebijakan berikut ini dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan pemerintah federal dan pemerintah daerah akan sistem pemerintahan yang terintegrasi. Instruksi No. 3 Tahun 2003 dari

Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian disempurnakan dengan aturan yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Konsep pemerintahan digital merupakan strategi alternatif untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan dan menjawab kebutuhan rumit masyarakat Indonesia akibat penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan publik. Dengan diterapkannya pemerintahan digital atau digital *government* dalam tata kelola kota atau dikenal juga dengan konsep *smart city*, reformasi digital saat ini melahirkan sebuah gerakan yang mengiringi upaya pemanfaatan teknologi informasi. (Ruru *Et Al.*, 2018)

Oleh sebab itu, Indonesia memberlakukan dan menerapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2018) yang disingkat menjadi SPBE. Didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE merupakan suatu aturan yang mengatur terkait pengimplementasian kegiatan pemerintahan sebagai pelayan publik yang memanfaatkan teknologi digital atau era globalisasi sehingga dapat menunjang kegiatan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas. Melalui Perpres juga dijelaskan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi

data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau yang terhubung. Dalam hal ini juga kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan dan strategi pengembangan *e-government* pemerintahan pada era globalisasi menuntut aspek kehidupan atau aktifitas sehari-hari dengan lebih mudah atau praktis.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020) hasil dari *United Nations (UN) E-Government Survey 2020* Indonesia menempati peringkat 88 dengan skor 0.6612 dari 193 negara atas pengembangan aplikasi pemerintahan elektronik (*E-Government*) atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dengan artian bahwa Indonesia berhasil menempati posisi 100 besar peringkat global. Menurut laporan *E-Government Survei 2020*, walaupun banyak tantangan negara-negara dikawasan Asia Tenggara, termasuk negara Indonesia bisa menciptakan kemajuan transformasi digital. Adanya survei ini tujuannya adalah untuk menjadi alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB, tantang dalam menghadapi era 4.0 dan bersaing dengan berbagai negara berkembang juga sebagai survei untuk mengidentifikasi kemampuan dan tantangan masing-masing dari negara tersebut sebagai upaya mempertajam implementasi kebijakan serta strategi dalam pengembangan penerapan sistem pemerintahan atau pemerintahan digital berbasis elektronik.

Menurut Ahmar *et al.*, (2021) dengan menerapkan sistem *E-Government*, maka masyarakat dapat memantau aktivitas dari apa yang direncanakan dan telah dilakukan oleh pemerintah, dengan adanya media yang menampung aspirasi masyarakat kemudian akan memicu kinerja pemerintah yang jauh lebih baik lagi. Pemerintah daerah Indonesia sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dengan

mengembangkan *smart government* di seluruh nusantara. (Aslamaturrahmah *et al.*, 2018). Pemerintah yang cerdas dapat menggabungkan sistem pelayanan publik agar mudah digunakan oleh pemerintah daerah. (Alfiyah, 2019)

*E-Government* merupakan salah satu perkembangan besar di bidang administrasi publik yang dimana implementasinya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai alat baru dalam memberikan pelayanan publik yang berbeda dan berkembang di era globalisasi ini. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara cepat, efektif, dan efisien untuk memberikan pelayanan publik kepada seluruh warga negara. Dalam memenuhi kebutuhan warga negara, pemerintah harus mengembangkan pelayanan berbasis elektronik (*E-Government*) sesuai dengan diterbitkannya dan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *E-Government* (Ramadhan *et al.*, 2019).

Menurut Tulungen *et al.*, (2022) dalam pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia diharapkan tujuan revolusi industri untuk memfasilitasi dan mempercepat penyampaian layanan 4.0 yang menggabungkan sumber daya, teknologi informasi. Reformasi tersebut pun menghasilkan aspek infrastruktur pemerintahan digital yang cukup maju. Peran kepemimpinan atau *leadership* dalam implementasi transformasi digital ini juga sangat berperan dalam pengembangan *e-government* ini. Indikator kepemimpinan yang ideal juga untuk dapat beroperasi di lingkungan yang kompleks, tidak pasti, dan fleksibel, seseorang harus menguasai teknologi digital dan memiliki kelincahan

emosional. Diharapkan juga peran pemimpin bisa menjadi tolak ukur dalam proses pengembangan pelayanan publik untuk masyarakat (Mihai & Crețu, 2019).

Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi yang berada di Pemerintah Daerah yang berada di Indonesia sangat cepat dan pesat. Salah satunya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang banyak mengembangkan berbagai aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat setiap tahunnya. Kabupaten Bantul termasuk dalam kabupaten yang mengembangkan teknologi secara baik, dengan didukung dengan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mempunyai penduduk terbanyak kedua setelah Kabupaten Sleman. Berdasarkan data statistik provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah total penduduk Kabupaten Bantul adalah 956.513 penduduk.

**Tabel 1.1**

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANTUL, D.I YOGYAKARTA SEMESTER II 2021  
MENURUT JENIS KELAMIN**

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas

Kecamatan / Kaparewon	Penduduk		
	L	P	L+P
BRANDAKAN	15.482	15.596	31.078
SANDEN	15.677	16.309	31.986
KRETEK	15.015	15.652	30.667
PUNDONG	17.688	18.123	35.811
BAMBIANG LIPURO	20.564	21.129	41.693
PANDAK	26.086	26.806	51.892
PAJANGAN	18.388	18.380	36.768
BANTUL	32.137	32.583	64.720
JETIS	29.293	29.416	58.709
MOGIHI	31.715	32.305	63.920
DUNGO	19.945	20.167	40.002
BANGSUNTAPAN	56.488	57.198	113.684
PLERET	24.488	24.084	48.570
PIYUNGAN	26.378	26.649	53.029
SEWON	50.562	50.310	100.872
KASIHAN	52.306	52.695	104.991
BEDAYU	24.209	24.236	48.445
Jumlah	476.315	480.198	956.513

sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

*Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan  
Setda DIY*

Dan saat ini, pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memberikan inovasi berupa aplikasi yang menunjang jalannya pelayanan publik secara online di pemerintahan masing-masing. Kabupaten Bantul menjadi salah satu Kabupaten yang berada di Indonesia yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengembangan di era globalisasi ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah selesai melakukan evaluasi nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam hasil nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 3.62 dan

masuk menjadi salah satu instansi terbaik di Indonesia. Berikut ini merupakan hasil dari evaluasi SPBE tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 1503/2021 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

**Gambar 1.1 Hasil Evaluasi SPBE Tertinggi**



www.altha.co.id

Sumber: <https://spbe.co.id/2022/04/21/mengenal-sembilan-instansi-peraih-nilai-spbe-tertinggi-tahun-2021%EF%BF%BC/>

Salah satu faktor keberhasilan Kabupaten Bantul menjadi Daerah terbaik dalam mengembangkan SPBE tahun 2021 karena adanya terobosan baru atau inovasi baru berkaitan dengan aplikasi yang akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan pemerintahan. Salah satu aplikasi tersebut yaitu Bantulpedia, aplikasi ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hari jadi Kabupaten Bantul ke-190 tahun yaitu pada tanggal 26 Juli 2021. Bantulpedia adalah sebuah aplikasi

platform *single side on* yang mengintegrasikan 24 aplikasi layanan dari 33 aplikasi layanan dari organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Bantul. 24 aplikasi layanan tersebut yaitu Layanan Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan, Hukum, Penanaman Modal, Pajak Dan Retribusi, Perdagangan, Pariwisata, Satu Data, CCTV Bantul, Info Lokasi Wifi, Hubungi Kami, Galeri Foto, Galeri Video, Event Bantul, Laporan Bantul, Survei, ILM, Berita, Pengumuman, Darurat 112, *E-surat* (terkhusus Aparatur Sipil Negara). Sudah lebih dari 1500 orang mengunduh aplikasi Bantulpedia dan 313.465 orang mengunjungi dan menggunakan website Bantulpedia. Aplikasi yang bisa diakses dimana saja bisa di laman web bantulkab (2022) <https://www.bantulkab.go.id/> klik menu *Bantulpedia*, jadi dengan seperti ini masyarakat bisa memilih berbasis mobile atau website semua tersedia dan untuk akses mendownload bisa dari *Playstore* atau *App store* secara gratis. Dalam aplikasi ini terdapat layanan yang disediakan pemerintahan Kabupaten Bantul yang telah bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyatukan seluruh aplikasi pelayanan di setiap OPD ke dalam satu wadah atau *platform* yang diberi nama Bantulpedia.

Aplikasi Bantulpedia menyediakan fitur-fitur dan penawaran yang menarik dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan. Namun dalam penerapan *e-government* ini pasti tak luput juga terdapat kelemahan yang ada di aplikasi Bantulpedia seperti halnya aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dalam kenyataannya implementasi *e-government* tidak semudah yang dibayangkan karena program tersebut melibatkan banyak hal yang perlu dipersiapkan dan berbagai proses yang harus dilakukan seperti perencanaan, penyediaan infrastruktur



Teknologi Informasi dan Komunikasi, pendanaan yang cukup, dukungan manajemen, dan sebagainya. Meskipun begitu, aplikasi Bantulpedia ini bisa dibidang banyak memiliki kelebihan, kelebihan aplikasi yaitu aplikasi pertama yang menawarkan fitur yang menarik dan menjadi aplikasi pertama yang menyatukan semua aplikasi organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bantul yang sudah terintegritas menjadi satu di aplikasi Bantulpedia. Tetapi, dikarenakan aplikasi baru dirilis satu tahun yang lalu, masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui aplikasi baru ini walaupun telah ada usaha dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mempromosikan aplikasi tersebut tetapi upaya tersebut masih kurang, maka untuk mendukung promosi, pengembangan aplikasi pemerintah ini dibutuhkan peran dari aspek kepemimpinan, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan memadai. Aspek tersebut dibutuhkan guna menunjang keberhasilan pengimplementasian aplikasi pemerintahan. Dalam aplikasi tersebut juga masih banyak fitur yang belum dapat diakses seperti aplikasi pajak, masih ada 9 aplikasi organisasi perangkat daerah yang belum masuk ke dalam aplikasi Bantulpedia dan terdapat adanya keluhan dari masyarakat dalam mengakses website maupun aplikasi Bantulpedia tersebut.

Keberhasilan penerapan *E-government*. *E-government* membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memadai contohnya dalam aspek kepemimpinan, infrastruktur, teknologi, komunikasi, komersial & manajemen. Keterampilan teknis yang nantinya digunakan untuk penerapan, pemeliharaan, perancangan & pemasangan infrastruktur TIK, kemudian keterampilan yang dapat berguna dalam memakai & mengelola proses *online*, fungsi & pelanggan, dalam

hal ini dinamakan sebagai pelayanan yang dapat mementingkan kualitas informasi & kualitas pelayanan. Beberapa kendala dalam penerapan *E-Government* yang tidak teknis misalnya akibat budaya baru dengan digital ataupun teknologi baru yang mempengaruhi masyarakat ataupun pengguna.

Oleh karena itu, permasalahan yang ada telah menjadi tujuan penelitian ini dilakukan oleh peneliti diangkat dari permasalahan dan keresahan masyarakat ataupun pengguna dalam layanan tersebut, dengan bisa dilihat dari beberapa komentar masyarakat pada website pemerintah daerah. Hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi implementasi pelayanan publik berbasis pemerintah digital ini, sehingga hal ini penting untuk mengetahui bahwa sejauh mana tingkat implementasi Pemerintahan Digital dalam persepsional penerapan Aplikasi Bantulpedia di Kabupaten Bantul. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan mengambil tiga variabel yaitu Kepemimpinan, Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Implementasi Pemerintahan Digital dan mengambil studi persepsional di Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Sejauh Mana Tingkat Implementasi Pemerintahan Digital Dalam Persepsional Penerapan Aplikasi Bantulpedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022?

1.2.2. Seberapa Besar Pengaruh Kepemimpinan, Infrastruktur, Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Implementasi Pemerintahan Digital Dalam Persepsional Penerapan Aplikasi Bantulpedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.3.1. Mengetahui Tingkat Implementasi Pemerintahan Digital Dalam Persepsional Penerapan Aplikasi Bantulpedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3.2. Menguji Pengaruh Kepemimpinan, Infrastruktur, Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Implementasi Pemerintahan Digital Dalam Persepsional Penerapan Aplikasi Bantulpedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat memperluas dan memperbanyak referensi atau kajian penelitian dibidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Terkhususnya bagi program Studi Ilmu Pemerintahan dapat untuk pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya kajian keilmuan yang berkaitan dengan Implementasi Pemerintahan Digital.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menggunakan penelitian ini untuk menginformasikan kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan standar berupa aspek Kepemimpinan, Infrastruktur, Teknologi Informasi Dan Komunikasi untuk meningkatkan Implementasi Pemerintahan Digital.

## **1.5 Kajian Pustaka (*Literature Review*)**

Berikut yaitu dimungkinkan untuk memetakan, mengkategorikan dan mengklasifikasikan studi sebelumnya terkait dengan Implementasi Pemerintahan Digital di Indonesia secara taksonomi:

1. Romandhon *et al.*, (2022) meneliti dengan metode kuantitatif tentang **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang diuji yaitu persepsi kemudahan,

kegunaan, sikap penggunaan, perilaku, dan tingkat pemahaman penggunaan terbukti berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Link:

<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech/article/view/2149>

2. Dede (2020) meneliti dengan metode kuantitatif tentang **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Perilaku Pengguna Aplikasi”Jogja Istimewa”** Melalui *Unfied Model Of Electronic Government Adoption* (Umega). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel yang diujikan berpengaruh terhadap sikap dan kedua variabel lainnya tidak berpengaruh didalam aplikasi tersebut.

Link:

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/4031>

3. Ahmar *et al.*, (2021) meneliti dengan metode kuantitatif tentang **Pengaruh Penerapan E-Government terhadap Pelaksanaan Good Governance di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* berpengaruh terhadap *good governance*. Hasil menunjukkan signifikan terhadap pelaksanaan *good governance* di Dinas Kominfo dan Statistik.

Link :

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3741>

4. Roes Setyadi *et al.*, (2019) meneliti dengan metode kuantitatif tentang **Pengaruh Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi *Electronic Government* Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Cilegon**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan birokrasi terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik dan implementasi *electronic government* secara bersama berpengaruh positif pada kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebesar 28,6%.

Link:

<http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/1094>

5. Ruru *et al* (2018) meneliti dengan metode kualitatif tentang **Implementasi Program Digital Government Smart City Kota Manado**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Digital Government Smart City* di Kota Manado ditemukan belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal tersebut karena faktor yang belum maksimal dalam mengelolanya yaitu dibidang teknologi informasi, anggaran infrastruktur dan sumberdaya manusia yang kompeten.

Link:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/30546/29412>

6. Kurnia *et al* (2017) meneliti dengan pendekatan teoretis-konseptual dan perundang-undangan tentang ***E-Government* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia**. menulis dan menjelaskan

pemanfaatan *e-government* didalam pelaksanaan pemerintahan daerah di indonesia menggunakan perspektif yuridis.

Link:

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14608>

7. Kristyanita (2021)meneliti dengan metode kualitatif **Implementasi E-Suradi (Surat Digital) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Malang**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-suradi* yang berada di kota malang sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang berpedoman pada keempat variabel dalam model implementasi kebijakan yang sudah ditentukan dalam hal pelaksanaan seperti halnya komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Aplikasi tersebut juga menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari *good governance*.

Link:

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/12016/9303>

8. Sofianto, 2019 meneliti dengan metode kualitatif tentang **Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital Di Provinsi Jawa Tengah**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi aplikasi GRMS membantu pelaksanaan pemerintahan. Kendala yang ada yaitu belum optimalnya sistem aplikasi untuk pelaksanaan manajemen pemerintah dan adaptasi kebiasaan bekerja secara online.

Link:

<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/597>

9. Rozikin *Et Al.*, 2020 meneliti dengan metode studi pustaka tentang **Kolaborasi Dan *E-Literacy*: Kunci Keberhasilan Inovasi *E-Government* Pemerintah Daerah**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sumberdaya manusia, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat adalah faktor pendukung keberhasilan *e-government*.

Link:

<http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/603>

10. Ade Irawan & Hany Fanida (2020) menggunakan teknik penelitian kualitatif, **Penerapan *Electronic Government* Melalui System Layanan Surat Keterangan Elektronik (E-Suket) di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di kalurahan pojok memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaan pelayanan *e-suket* dengan beberapa faktor yang mendukung yaitu faktor pemimpin, faktor *standard operating procedur* (sop) dan teknologi dan infrastruktur.

Link:

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/34410>

11. Kertati (2020) menggunakan teknik penelitian yaitu teknik kualitatif, **Implementasi *Smart Government* Kota Surakarta**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mengimplementasikan empat komponen dalam *smart city* yaitu keberhasilan infrastuktur kota pintar, sumber daya manusia dan peraturan. Tetapi dalam sumber daya manusia dan



infrastruktur terdapat belum maksimalnya dalam pelaksanaannya dan yang diharapkan.

Link:

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1412>

12. Susanty & Yuningsih (2021) meneliti dengan metode kualitatif deskriptif tentang **Implementasi *Electronic Government*: Studi Persepsional Pada Aplikasi Silpa Kami Di Pemerintah Kota Cimahi**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sukses implementasi *e-government* berjalan dengan baik. Aspek *e-leadership*, aspek infrastruktur jaringan informasi, aspek pengelolaan informasi, aspek lingkungan bisnis serta masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan implelementasi *e-government*.

Link:

<https://scholar.archive.org/work/xm4krfwlebg73ickvbo6tkxjqe/access/wayback/http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/download/696/pdf>

13. Nugraha (2018) meneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif tentang ***E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)***. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan terdapat beberapa alasan perbedaan yang terjadi antara daerah dengan daerah lainnya dengan berbagai alasan, seperti faktor keterbatasan anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. *E-government* yang ada memunjukkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan tanpa disertai peningkatan kualitas.

Link:

<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/758>

14. Tulungen *et al.*, (2022) meneliti dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka tentang **Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital**. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan kepemimpinan digital saat ini sangat krusial untuk membantu mewujudkan transformasi digital dan dengan memanfaatkan teknologi informasi proses kerja dalam beberapa sektor pada pemerintahan akan semakin terbantu nantinya.

Link:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/41399>

15. Cahyarini (2021) meneliti dengan metode penelitian studi persepsional tentang **Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital Pada Pelayanan Publik**. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kepemimpinan digital memberikan dampak pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal dan pelayanan publik berbasis digital pun mengalami perbaikan yang optimal, dilihat dari pencapaian prestasi yang telah dicapai.

Link:

<https://202.89.117.136/index.php/jskm/article/view/3780>

16. Evita & Aristoteles Mukhaer (2022) meneliti dengan metode kualitatif studi persepsional tentang **Evaluasi Komunikasi dan Literasi Digital Warga Jakarta dalam Implementasi Society 5.0**. Hasil penelitian menunjukkan

terdapat adanya kesenjangan teknologi digital dan minimnya literasi digital yang mana masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui aplikasi-aplikasi pelayanan publik online.

Link:

<https://jurnalrisetkomunikasi.org/index.php/jrk/article/view/541>

17. Herma Nadia & Rachmatulah Putra (2022) meneliti dengan metode kualitatif deskriptif tentang **Implementasi Kebijakan Program System Integrasi Aspirasi Pengaduan – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR) sebagai wujud *Open Government Policy* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik komunikasi antar pelaksana, disposisi, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam program SIAP-LAPOR telah menunjukkan keberhasilan dan telah terpenuhi secara baik.

Link:

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/17955>

18. Setiawan Irfan (2019) meneliti dengan metode kualitatif tentang **Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Pontianak**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era *e-government* sudah berjalan dengan baik dengan

faktor pendukung pada struktur daerah, kualitas sumber daya manusia dan kapasitas keuangan daerah.

Link:

<http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/article/view/715>

19. Putra Ardinata *et al.*, (2022) meneliti dengan metode studi pustaka tentang **Kepemimpinan Transformasional sebagai solusi pengembangan konsep *Smart City* menuju Era Society 5.0: Sebuah Kajian Literatur.** Hasil penelitian menemukan bahwa kepemimpinan transformasional menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan atau mengembangkan konsep *smart city* di era *society 5.0*.

Link:

<http://alisyraq.pabki.org/index.php/alihtiram/article/view/206>

20. Karmanis (2022) meneliti dengan metode kualitatif tentang **Urgensi Reformasi Administrasi dalam Citizen-Centric, dan *E-Government* di Indonesia.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-government* di Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan. Dengan cara transformasi pelayanan publik dari model *Old Administrasi Public* menuju *New Public Service* dengan ditunjang adanya reformasi regulasi dibidang Administrasi Publik.

Link:

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/2787>

21. Hanafi Ahmad *et al.*, (2022) meneliti dengan metode kualitatif tentang **Pelaksanaan *E-Government* pada Aplikasi Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online (Sikesal) di Kota Jambi Tahun 2018-2019**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *E-Government* pada aplikasi Sikesal oleh pemerintahan Kota Jambi tahun 2018-2019 berjalan tidak optimal pada implementasinya dilapangan, dikarenakan tingkat kesiapan *e-government* hanya terpenuhi dua indikator dari total lima indikator pelaksanaan.

Link:

<http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/igj/article/view/1875>

Namun demikian, studi-studi dan penelitian-penelitian terdahulu itu kurang memperhatikan faktor-faktor kepemimpinan, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi. Sumber daya manusia, kualitas kepemimpinan, infrastruktur, teknologi informasi, dan lingkungan bisnis (swasta) adalah beberapa faktor signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan inovasi pemerintah daerah.

Seperti yang ditunjukkan oleh Muflihah & Susanto (2017) dan Rian Andhika, (2018), bahwa kerjasama penataan kelembagaan, pelaku kebijakan, dan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi inovasi pemerintah daerah. *E-government* di pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh aspek infrastruktur jaringan informasi, teknologi informasi dan komunikasi, lingkungan bisnis, sumber daya, dan masyarakat. (Nikolar & Sitokdana, 2019)

Membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hal yang baru dan berbeda. Karena penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian

tersebut dengan penelitian sebelumnya sebab diambil berdasarkan permasalahan dan keresahan masyarakat ataupun pengguna dalam layanan tersebut, penelitian ini juga diambil peneliti atas dasar ketertarikan peneliti dengan aplikasi yang baru saja diluncurkan berdasarkan *website* resmi Kabupaten Bantul tahun 2021 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang menarik untuk diteliti lebih dalam serta faktanya penelitian terdahulu memang telah banyak yang membahas atau mengeksplorasi kajian-kajian tentang *e-government*, akan tetapi tujuan penelitian ini yaitu mengisi kekosongan dari penelitian terdahulu, menemukan temuan baru dan mengisi kesenjangan penelitian.

Dan penelitian terdahulu lebih sering menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka. Mempertimbangkan dari penelitian terdahulu yang banyak telah mengeksplorasi kajian-kajian tentang *e-government* yang berkembang mendominasi penelitian terdahulu, akan tetapi penelitian terdahulu masih banyak yang mengkaji *e-government* hanya dalam lingkup sempit atau hanya dengan satu aspek variabel dengan ini untuk melengkapinya maka peneliti akan mengkaji dengan tiga variabel. Tiga variabel yang akan peneliti yaitu kepemimpinan, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi terhadap implemmentasi pemerintahan digital pada Aplikasi Bantulpedia di Diskominfo Kabupaten Bantul Tahun 2022.

## **1.6 Kerangka Teoretik (*Theoretical Framework*)**

### **1.6.1 Implementasi Pemerintahan Digital (Variable Y)**

Di Indonesia sejak tahun 2001 melalui intruksi presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk menunjang dan mewujudkan *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui *electronic government* itu sendiri juga dikeluarkan instruksi presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*.

Nadila *et al.*, (2021) menyatakan juga bahwa *E-Government* diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua perilaku dalam publik sektor baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang melibatkan berbagai aspek yang ada yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka untuk mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, efektif. Istilah *e-government* juga berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah dan masyarakat, pemerintah dengan pelaku bisnis dan sebagainya agar tetap terjalin komunikasi dan informasi yang stabil.

Menurut Ridwan *et al.*, (2017) pengertian dari *Electronic Government* atau *e-government* yaitu suatu bentuk dari pengimplementasi penggunaan teknologi informasi bagi pemerintah kepada publik atau pengguna. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas

layanan publik secara efektif dan efisien. Pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian berusaha diatasi dengan adanya penerapan *e-government*. Penyampaian pelayanan kepada publik tidak memakai dokumen-dokumen lagi dan interaksi antar satu dengan yang lain melalui *online*. Orientasi penekanan pembiayaan atau anggaran efisiensi biaya produksi di dalam pemberian pelayanan pun bergeser kepada orientasi yang menekankan pada *fleksibilitas*, pengawasan dan kepuasan pengguna. Adapun indikator keberhasilan implementasi digital government menurut (Riswati, 2021):

a. Ketercukupan Urusan

Kemampuan memberikan efisiensi, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan pelaksanaannya dengan baik, kecukupan menjadikan urusan pemerintahan terwujud dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme tetap terjaga. Kecukupan urusan merupakan indikator yang harus ada dalam rangka melaksanakan implementasi digital di pemerintahan.

b. Kecerdasan Teknologi (*Penyelesaian Urusan*)

Kehadiran kecerdasan teknologi dalam pemecahan masalah menjadi indikator selanjutnya. Layanan pemerintah diperkirakan akan meningkatkan indeks kepuasan jika dibandingkan dengan pemerintah non-digital, karena teknologi harus mampu mengatasi semua jenis masalah yang terjadi pada manusia.

c. Integrasi Antar Instansi Pemerintah



Efektivitas dan efisiensi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi yang baik. Dengan mengintegrasikan OPD pemerintah dalam melayani masyarakat dan menawarkan layanan yang efektif dari segi anggaran dan waktu proses, dapat diukur sejauh mana digitalisasi telah diterapkan di masyarakat.

d. Ketepatan Hasil Kerja

Ketepatan dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan penerapan digital government merupakan hal yang harus dilakukan. Ketepatan hasil kerja merupakan salah satu indikator dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan implementasi yang baik dengan menawarkan layanan yang efisien dari segi anggaran dan efektif dari segi waktu pengerjaan yang mampu melihat sejauh mana penerapan digitalisasi kepada masyarakat. Jelas dalam mengelola urusan pemerintahan sehingga nantinya menjadi acuan tujuan suatu organisasi atau lembaga tertentu guna mencapai tujuan tertentu yang sejalan dengan visi dan misi lembaga tersebut.

### **1.6.2 Kepemimpinan (Variable X1)**

Tanaamah *et al.*, (2021) mendefinisikan kepemimpinan yaitu, adanya pemimpin visioner yang dapat mendukung proses perbaikan antara hasil yang diinginkan dan penerapan teknologi informasi pemerintah secara menyeluruh. dengan menggunakan tujuan apapun, perencanaan, inovasi dan implementasi teknologi informasi dalam semua kegiatan organisasi, penyelarasan visi kepemimpinan dalam implementasi dapat ditunjukkan. Isu ini sering muncul sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasi teknologi informasi oleh

pemerintah secara keseluruhan. Alasan di balik transformasi digital di sektor pemerintah tidak diragukan lagi adalah serangkaian keniscayaan. Di era Industri 4.0, kunci untuk merangkul penggunaan teknologi adalah adopsi.

Di era globalisasi digital saat ini, para pemimpin harus siap dengan ketabahan Menggunakan alat digital dan emosional dalam lingkungan yang menantang dan ambigu. Pemimpin dengan efisien bekerja dalam siklus pembelajaran yang cepat dalam pengambilan keputusan proses dan inovasi. (Mihai & Crețu, 2019) Perpaduan filosofi kepemimpinan dan penerapan teknologi digital dikenal sebagai "kepemimpinan digital". Seorang pemimpin digital perlu memiliki sifat dan berperilaku dengan cara yang memungkinkan mereka mencapai tujuan mereka untuk transformasi digital dan juga seorang pemimpin haruslah memiliki bekal atau ilmu yang lebih dalam mengimplementasikan digital ini. (Magesa Mwitwa & Joanthan, 2019)

Untuk mempromosikan adopsi teknologi informasi pemerintah baik di sektor swasta maupun perusahaan sektor publik, kepemimpinan sangat penting. Tanaamah *et al.*, (2021). Berbagai penelitian dilakukan untuk mendukung implementasi tata kelola teknologi informasi pada sektor publik. Gaya kepemimpinan organisasi berdampak pada keberhasilan kepemimpinan teknologi informasi. (El-Ebiary *et al.*, 2020). Kemampuan CIO untuk mengkomunikasikan visi teknologi informasi dalam organisasi dan bagaimana model teknologi informasi pemerintah yang tepat memastikan bahwa visi ini dapat dipahami oleh manajer organisasi dipandang sebagai model kepemimpinan teknologi informasi. Ini juga berguna dalam perkembangan kapasitas organisasi dalam suatu instansi

(Wiedenhof *et al.*, (2017). Dalam mengembangkan informasi teknologi *government* maka diseminasi pengetahuan untuk memajukan organisasi merupakan salah satu unsur penting bagi pemimpin. Seorang pemimpin yang sukses dan memiliki gaya kepemimpinan yang baik dapat mengimplementasikan perubahan, memiliki bekal digital, memperkuat sumber daya organisasi dan meningkatkan output (al Amiri *et al.*, 2020).

Menurut Rudianto *et al* (2006) dalam bukunya yang berjudul *Electronic Government in Action leadership type* atau gaya kepemimpinan yang terbukti efektif di dalam mengelola struktur organisasi birokratis adalah “*command and control*” seperti yang biasa diterapkan pada organisasi militer. Idealnya, seseorang pemimpin dapat menggabungkan antara gaya kepemimpinan seorang profesional dan seorang wiraswastawan atau *entrepreneurship*. Karena dengan begitu. seluruh departemen telah dihubungkan melalui infrastruktur teknologi informasi (data, aplikasi, dan teknologi), maka fungsi pemerintah menjadi berubah, dari seorang pemberi perintah dan pengontrol, menjadi seorang fasilitator dan koordinator yang bekerja berdasarkan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Kemudian, (Widianto & Rahman, 2020) melahirkan konsep *smart integrated leadership*. Kemudian dikenal dengan akronim SMILE. *Smart Integrated Leadership* (SMILE) yang memiliki komponen amanah, kejujuran, kepatuhan, keteguhan dan kecendekiawanan (kearifan lokal. Menurut (Prayudi, 2017) keberhasilan dari suatu implementasi pemerintah digital dari faktor kepemimpinan memiliki pengaruh yang cukup besar dapat dilihat bahwa seorang pemimpin memiliki otoritas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya:

#### A. Kemampuan merencanakan pekerjaan

Kemampuan merencanakan pekerjaan merupakan kemampuan seseorang pemimpin untuk menunjang perencanaan instansi atau organisasi guna menunjang implemetasi pemerintahan digital secara terorganisir dan mengatur setiap pekerjaan agar lebih berkualitas baik kedepannya dan mencapai tujuan instansi tanpa mengalami kesulitan baik dalam emosional maupun finansial.

#### B. Kemampuan pengarahan

Kemampuan pengarahan merupakan mereka pemimpin yang memiliki jiwa untuk memberikan arahan dan dukungan terhadap karyawan untuk mencapai suatu sasaran visi misi instansi guna mengembangkan implemntasi pemerintahan digital. Baik dalam memberikan arahan tugas, nasihat dan arahan khusus dalam menghadapi keadaan sulit dalam pengembangan *e-government*.

#### C. Kemampuan menyelesaikan masalah

Keterampilan pemecahan masalah seorang pemimpin mencakup kapasitas untuk memeriksa masalah dan sampai pada kesimpulan tentang bagaimana melanjutkan dengan cara yang metodis yang memperhitungkan semua opsi yang tersedia untuk membantu penerapan implementasi pemerintahan digital.

### **1.6.3 Infrastruktur (Variable X2)**

Infrastruktur yang sering disebut sebagai prasarana dan sarana oleh seorang pakar institusi Belanda Ir. Ewoud Verhoef (TU Delf Belanda) didefinisikan sebagai suatu sistem teknologi dalam skala besar yang terdiri dari sejumlah fasilitas fisik tak bergerak yang memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat disepanjang

proses penyediaan (*storege*), perubahan (*conversion*). Dengan kata lain infrastruktur merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi primer dan memberikan pelayanan untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan masyarakat atau instansi, maka tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan pemerintah ataupun masyarakat akan terganggu.

Menurut Ade Irawan & Hany Fanida, (2020) faktor keberhasilan penerapan *electronic government* selanjutnya adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi menjadi faktor yang penting pada penentu keberhasilan *electronic government* di lingkungan pemerintah. Dukungan infrastruktur seperti perangkat lunak ataupun perangkat keras menjadi hal utama dalam pelaksanaan *electronic government*. Berikutnya, menurut (Sinta, 2019) infrastruktur atau keberadaan sarana dan prasarana mempengaruhi implementasi pemerintahan digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat krusial untuk bisa menjamin proses berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur yang mampu menunjang implementasi pemerintah digital memiliki indikator menurut (Usman, 2017) yaitu sebagai berikut:

a. Kelengkapan hardware

Untuk menjalankan perangkat pendukung pelaksanaan digitalisasi diperlukan perangkat keras yang lengkap, seperti komputer dan perangkat lainnya, oleh karena itu penerapan digitalisasi di pemerintahan tidak lepas dari infrastruktur pendukungnya. Keberadaan perangkat keras pendukung sangat penting untuk keberhasilan implementasi karena tanpa itu, layanan dan implementasi akan terhambat, dan menggunakan pemerintah non-digital akan menghasilkan skor

kepuasan publik yang lebih rendah. Kehadiran perangkat keras juga berfungsi untuk menekan isu digitalisasi di pemerintahan.

b. Kelengkapan jaringan internet

kualitas dan kelengkapan jaringan internet, melalui komponen ini dapat diketahui bahwa kemampuan pengelolaan dan kualitas infrastruktur yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, kualitas dan kelengkapan jaringan internet mempengaruhi server aplikasi, baik dari segi kualitas dan tata kelola, diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, dan diharapkan menjadi salah satu indikator keberhasilan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### **1.6.4 Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Variable X3)**

Implementasi atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam skala besar tidak hanya menimbulkan keuntungan saja tetapi juga menimbulkan tantangan tertentu. Yaitu dimana TIK ini memiliki peran penting dalam perkembangan pemerintahan digital yang harus memiliki kualitas yang bagus untuk menunjang berkembangnya *e-government*.

Menurut susanto dalam buku Desmaniar & Zuliana Linggo Geni (2019) menyatakan, bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan media yang di gunakan untuk kebutuhan transfer file, baik berupa informasi maupun data. Selain itu, juga menjadi sebuah alat komunikasi secara searah atau dua arah. Selanjutnya, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi informasi dan komunikasi adalah yang menjadikan

semua teknologi yang akan berhubungan dengan penanganan sebuah informasi dan komunikasi yang baik.

Menurut Hammer dan Champy dalam jurnal (Nugraha, 2018) menyebutkan bahwa perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini, telah dianggap juga sebagai sumber daya yang sangat penting bagi organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta saat ini. Menurut (Li, 2021) dalam teknologi informasi dan komunikasi memiliki indikator dalam mengukur keberhasilan dalam implementasi *e-government*:

a. *Security system* (keamanan sistem)

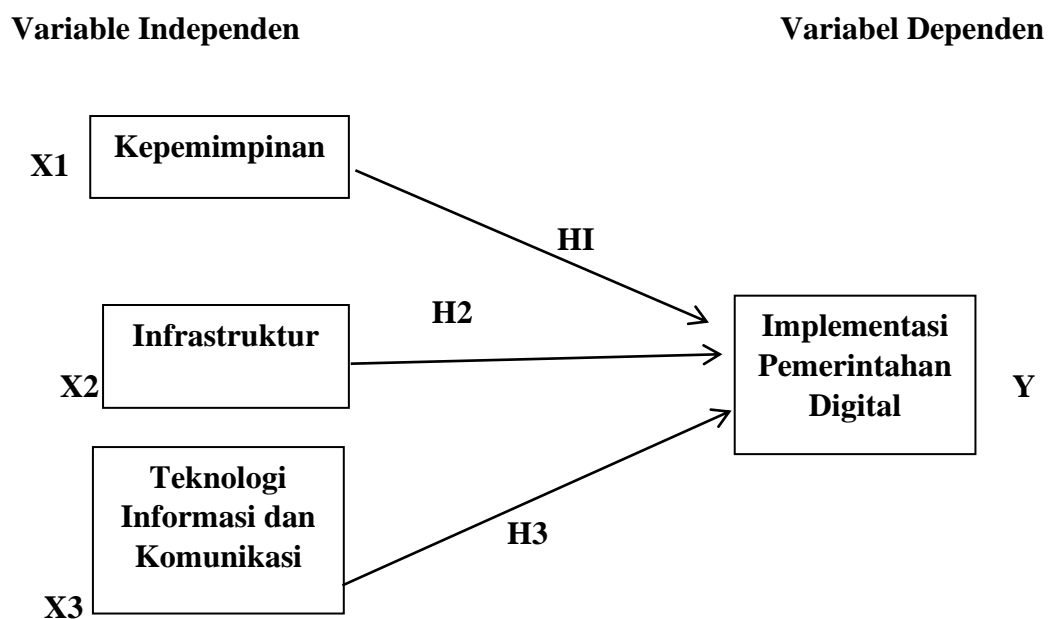
Keamanan sistem hal yang penting dalam pengimplementasian *e-government*. Pemerintah harus memberikan kepercayaan pada publik bahwa tersedianya transaksi data pemerintah dan pengguna tunduk pada protokol keamanan ataupun pemerintah dengan instansi lainnya, yang dengan ini memiliki arti sistem seharusnya memiliki menjamin keamanan data publik yang terbatas dalam melakukan transaksi pelayanan. Menurut Delone & McLean terdapat variable yang dikutip dalam (Agustina & Sutinah, 2019) yakni salah satunya kualitas sistem yaitu di dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan sebuah kemudahan dalam menerapkan pemerintahan berbasis elektronik dengan baik, Adapun indikator tersebut berupa:

b. Kecanggihan Software

Kecanggihan yang diberikan dan saat di navigasikan melalui software-software teknologi informasi dan komunikasi, kelengkapan dari fitur-fitur yang ada

di dalam pelayanan membuat pelayanan menjadi sangat baik, karena selain fitur-fitur yang lengkap tetapi juga di lengkapi dengan petunjuk navigasi membuat pengguna pelayan yakni masyarakat senang menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.

**Gambar 1.2 kerangka Teoritik**



## 1.7 Hipotesa

- 1.7.1. Kepemimpinan mempengaruhi implementasi pemerintahan digital secara positif dan signifikan.
- 1.7.2. Infrastruktur mempengaruhi implementasi pemerintahan digital secara positif dan signifikan.
- 1.7.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi implementasi pemerintahan digital secara positif dan signifikan.



## **1.8 Definisi Konsep dan Operasional**

### **1.8.1 Definisi Konsep**

#### **1.8.1.1. Implementasi Pemerintahan Digital**

Implementasi Pemerintahan Digital merupakan suatu pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan pihak lain (masyarakat, instansi lain serta pengusaha) dengan visi dan misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan konsep pemerintahan digital di era 4.0. Hubungan dengan implementasi pemerintahan digital yaitu Suatu bentuk dari pengimplementasi penggunaan teknologi informasi bagi pemerintah kepada publik atau pengguna kedalam pelaksanaan pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan kualitas partisipasi dan menjamin hasil kerja lebih tepat bagi masyarakat dan instansi tertentu.

#### **1.8.1.2. Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan sikap perilaku seorang pemimpin yang berguna untuk menunjang visi misi instansi tertentu dan yang dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi digital atau *e-government* dalam mewujudkan perubahan digital yang *modern*. Dengan didukung seorang pemimpin digital yang memiliki karakteristik dan perilaku guna menunjang tujuan perubahan digital dan penerapan *e-government*. Kepemimpinan berhubungan dengan implementasi pemerintahan digital

terkait pada pengimplementasian aplikasi dengan menerapkan atau dengan dukungan kepemimpinan yaitu sikap perilaku kepemimpinan yang baik untuk mendukung implementasi pemerintahan digital.

#### 1.8.1.3. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu sistem penunjang fasilitas atau kebutuhan pelaksanaan dalam wujud objektif dan subjektif guna untuk kegiatan pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki fungsi primer dalam pengembangan *e-government* atau berhubungan dengan pelaksanaan implementasi pemerintahan digital dalam memberikan pelayanan publik baik *offline* maupun *online* untuk mewujudkan tujuan sebuah organisasi instansi dalam penyediaan fasilitas yang lebih baik dan efisien.

#### 1.8.1.3. Teknologi informasi dan komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah sistem atau sarana yang berkembang pesat di era *industry 4.0* guna memenuhi kebutuhan administratif maupun data informasi bagi pemerintahan ataupun instansi lainnya secara aman dan efisien. Hubungan antara implementasi pemerintahan digital yaitu sebagai penunjang dalam teknis yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana *software*.

## **1.8.2 Definisi Operasional**

1.8.2.1. Indikator Implementasi Pemerintahan Digital mencakup:

- A. Ketercakupan urusan
- B. Kecerdasan teknologi (penyelesaian urusan)
- C. Integrasi antar instansi pemerintahan
- D. Ketepatan hasil kerja

1.8.2.2. Indikator Kepemimpinan meliputi:

- A. Kemampuan merencanakan pekerjaan
- B. Kemampuan pengarahan
- C. Kemampuan menyelesaikan masalah

1.8.2.3. Indikator Infrastruktur meliputi:

- A. Kelengkapan *hardware*
- B. Kelengkapan jaringan internet

1.8.2.4. Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:

- A. Keamanan data
- B. Kecanggihan *software*

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi tingkat pengaruh kepemimpinan, infrastuktur, teknologi informasi dan teknologi terhadap implementasi pemerintahan digital. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian survei. Salah satu jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian survei. Menurut kutipan dari Kerlinger (Astalini *et al.*, 2018). Tujuan dari penelitian survei

adalah untuk mengidentifikasi kesamaan di antara karakteristik populasi yang besar dengan membandingkan pengamatan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Fraenkel dan Wallen yang di kutip dari (Maidiana, 2021) bahwa penelitian survei merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan memberikan pertanyaan melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek yang telah di tentukan dalam suatu populasi. (Zakariah *et al.*, 2020) juga berpendapat bahwa penelitian survey merupakan penelitian yang dikumpulkan dengan mengumpulkan informasi melalui sampel. Menurut (Rasdiana, 2022) tipe penelitian kuantitatif ini merupakan tipe dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket yang menjadi sumber data utama pada instrumen penelitian ini. Kuisisioner atau angket bersifat murni dengan responden yang di minta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner dengan jujur dan apa adanya secara singkat menggunakan simbol tertentu, yang hasil dari pengumpulan jawaban dari responden akan di olah dengan menggunakan alat statistik tertentu.

### **1.9.2. Populasi (N) dan Sample (n)**

Menurut (Rohyani1 *et al.*, 2021) populasi merupakan subjek dan objek yang ada di wilayah generalisasi dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian di tarik menjadi kesimpulan. Dengan artian populasi di batasi menjadi kelompok atau orang yang paling tidak memiliki ciri-ciri tertentu.

Pada penelitian ini, semua pegawai yang *menggunakan e-government* pada studi ini berpartisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika beserta Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat, Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari populasi. Berdasarkan informasi dari *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul jumlah pegawai yang mengimplementasikan penerapan pemerintahan digital tersebut yaitu 120 orang.

Menurut (Darmawan, 2019), sampel merupakan sebagian dari keseluruhan objek atau subjek yang akan dijadikan sebagai perwakilan atau representasi dari seluruh populasi. (Suwandi *et al.*, 2018) juga menjelaskan bahwa sampel bisa diartikan sebagai sebagian kecil dari keseluruhan jumlah populasi yang akan diambil sesuai prosedur tertentu dengan harapan dapat mewakili populasinya.

Menurut (Sumargo, 2020), teknik sampling merupakan metode cara pengambilan sebagian dari populasi yang ditentukan, dengan demikian walaupun sampel namun dapat menggeneralisasi keseluruhan populasi.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*. Menurut (Sugiono, 2017), *simple random sampling* merupakan pengambilan anggota dari sampel populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Teknik ini digunakan karena bersifat populasinya homogen, yaitu khusus para pegawai yang mengimplementasikan *digital government* atau pemerintah digital. Maka agar lebih *representative*, peneliti akan mengambil sampel 104 responden dari populasi yang berjumlah 120 pegawai yang mengimplementasikan pemerintah digital tersebut.

**Tabel 1.2 Teknik Pengambilan Sampel Cohen Manion dan Marrison**

Population	Confidence level 90 per cent			Confidence level 95 per cent			Confidence level 99 per cent		
	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence
30	27	28	29	28	29	29	29	29	30
50	42	45	47	44	46	48	46	48	49
75	59	64	68	63	67	70	67	70	72
100	73	81	88	79	86	91	87	91	95
120	83	94	104	91	100	108	102	108	113
150	97	111	125	108	120	132	122	131	139
200	115	136	158	132	150	168	154	168	180
250	130	157	188	151	176	203	182	201	220
300	143	176	215	168	200	234	207	233	258
350	153	192	239	183	221	264	229	262	294
400	162	206	262	196	240	291	250	289	329
450	170	219	282	207	257	317	268	314	362
500	176	230	301	217	273	340	285	337	393
600	187	249	335	234	300	384	315	380	453
650	192	257	350	241	312	404	328	400	481
700	196	265	364	248	323	423	341	418	507
800	203	278	389	260	343	457	363	452	558
900	209	289	411	269	360	468	382	482	605
1,000	214	298	431	278	375	516	399	509	648
1,100	218	307	448	285	388	542	414	534	689
1,200	222	314	464	291	400	565	427	556	727
1,300	225	321	478	297	411	586	439	577	762
1,400	228	326	491	301	420	606	450	596	796
1,500	230	331	503	306	429	624	460	613	827
2,000	240	351	549	322	462	696	498	683	959
2,500	246	364	581	333	484	749	524	733	1,061
5,000	258	392	657	357	536	879	586	859	1,347
7,500	263	403	687	365	556	934	610	911	1,480
10,000	265	408	703	370	566	964	622	939	1,556
20,000	269	417	729	377	583	1,013	642	986	1,688
30,000	270	419	738	379	588	1,030	649	1,002	1,737
40,000	270	421	742	381	591	1,039	653	1,011	1,762
50,000	271	422	745	381	593	1,045	655	1,016	1,778
100,000	272	424	751	383	597	1,056	659	1,026	1,810
150,000	272	424	752	383	598	1,060	661	1,030	1,821
200,000	272	424	753	383	598	1,061	661	1,031	1,826
250,000	272	425	754	384	599	1,063	662	1,033	1,830
500,000	272	425	755	384	600	1,065	663	1,035	1,837
1,000,000	272	425	756	384	600	1,066	663	1,036	1,840

Sumber: (Cohen et al., 2018)

### 1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Darmawan (2019), Menggunakan metode pengumpulan data merupakan aktivitas atau proses yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menemukan dan mengungkapkan berbagai fenomena yang ditemukan, informasi terbaru, serta kondisi lokasi penelitian yang sesuai dengan lingkup penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner (angket). Menurut Yusup (2018) kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data primer yang dimana dalam pengumpulannya menggunakan item-

item pertanyaan ataupun penataan dengan menggunakan format tertentu dan kuesioner juga bisa didefinisikan menjadi metode pengumpulan data untuk kebutuhan studi survei. Sugiono juga menjelaskan Menurut Sugiyono, kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan serangkaian pertanyaan kepada responden. yang telah ditentukan peneliti berdasarkan prosedur yang ada atau ketentuan yang telah dibuat. (Suharto *et al.*, 2021)

Dalam penelitian ini peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner dibuat dalam bentuk *google form*. Peneliti menyebarkan *google form* tersebut kepada 104 orang pegawai yang mengimplementasikan *digital government* atau pemerintahan digital. Dengan teknik wawancara dan dokumentasi, peneliti melengkapi metode pengumpulan data. Peneliti akan berbicara dengan narasumber perwakilan dan pegawai pengelola Aplikasi Bantulpedia. Dokumen terkait penyelenggaraan pemerintahan digital diperoleh peneliti berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan bupati, dan peraturan bupati.

#### **1.9.4. Instrumen dan Pengukuran hasil Penelitian**

Menurut Yusup (2018), alat ukur pada penelitian merupakan sebuah sarana penelitian yang mempunyai kedudukan penting di dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan instrumen berperan dalam proses pengambilan data, karena data yang *reliabel* (dapat dipercaya) dan valid tergantung apakah instrumen itu *valid* atau tidak sehingga menghasilkan data untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup, menurut J. D. & Creswell (2017) merupakan sebuah angket yang disajikan dalam bentuk yang telah diatur sesuai yang ditetapkan dengan sedemikian rupa sehingga responden hanya perlu memilih pada jawaban yang telah disediakan oleh peneliti kepada responden. Menurut (Iskandar & Surohadikusumo, 2020), Pengukuran data adalah proses menghitung angka, dan skalanya meliputi skala ordinal dan skala khusus instrumen yang disebut skala *Likert*.

Menurut sugiyono yang dikutip (Suharto *et al.*, 2021), Skala *Likert* berguna untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang dalam kaitannya dengan fenomena sosial yang telah dideskripsikan secara tepat atau sesuai dengan faktor penelitian. Skala *Likert* digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur data. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana skala *Likert* digunakan untuk memastikan pendapat responden:

**Tabel 1.3 Skala Likert**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Nilai</b>
1.	Sangat setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Netral	3
4.	Tidak setuju	2
5.	Sangat tidak setuju	1



### **1.9.5. Teknik analisis data**

Menurut Sugiyono (2018), teknik analisa adalah cara yang digunakan dalam perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian, Metode yang digunakan dalam kaitannya dengan perhitungan untuk menyelesaikan rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan studi dikenal sebagai teknik analisis data. Sugiyono juga menjelaskan bahwa proses dalam menggunakan teknik analisis berupa pencarian data, penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan menjabarkan secara mengelompokan data dalam beberapa kategori atau unit-unit, menyusun pola untuk menentukan data krusial yang harus dipelajari, melakukan sintesis, dan menyimpulkan data yang sudah dikelompokan secara tersusun sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.(Sugiyono, 2018)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM-PLS. Model persamaan struktural generasi kedua yang digunakan dalam analisis *multivariate* Chin (1998) memungkinkan peneliti memasukkan variabel yang tidak dapat diamati secara langsung tetapi hanya diukur secara tidak langsung oleh variabel indikator. PLS, sebaliknya, adalah contoh sampel yang berjumlah kecil. (Juliandi, 2018). SEM-PLS teknik yang dirancang guna mengembangkan model beserta pengujian model, pada analisis yang akan dilakukan peneliti nantinya dapat memberikan kesempatan untuk menggambarkan model jalur antara variabel serta untuk menentukan indikator ke variabel. Kelebihan lainnya dari menggunakan SEM-PLS yaitu teknik permodelan

ini memperbolehkan ukuran sampel yang lebih kecil dan tidak membutuhkan asumsi distribusi normalitas. (Shmueli *et al.*, 2019)

SEM-PLS digunakan dalam penelitian ini untuk menguji regresi dan hipotesis serta menghitung *validitas* dan *reliabilitas*. Validitas berguna untuk memahami bagaimana kesesuaian data yang akan diukur dengan hasil pengukuran yang berkaitan dengan keakuratan data. (Nurjaya *et al.*, 2021) Tujuan reliabilitas adalah untuk menunjukkan dan menilai konsistensi tanggapan responden terhadap pertanyaan yang telah diberikan peneliti di dalam kuesioner (Nurjaya *et al.*, 2021). Uji Regresi adalah teknik metode yang bertujuan untuk menetapkan adanya hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bisa di definisikan sebagai suatu alat ukur yang dapat digunakan dalam pengukuran ada tidaknya korelasi antara variabel.

Sedangkan, Uji Hipotesa yaitu berguna untuk menentukan keputusan berdasarkan hasil analisis yang telah diolah atau dilakukan oleh peneliti. (Nurjaya *et al.*, 2021). Diperkuat pendapat dari (Dickson, 2020) juga berdasarkan cabang dari ilmu statistika *inferensial* yang dapat dipergunakan dalam menguji kebenaran dari suatu pertanyaan dengan dilihat secara statistik dan berguna dapat berguna dalam penarikan kesimpulan apakah pertanyaan tersebut menolak atau menerima kebenaran dari asumsi yang telah dibuat, berdasarkan ini juga hipotesis merupakan suatu uji yang memberikan suatu kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan yang bersifat objektif. (Dickson, 2020)